

Strategi Penanganan Kemiskinan Melalui Analisis Infrastruktur Dasar di Kota Medan

Bintang Marcopolo Purba^{1*}, Dessy Eresina Pinem², Arini Chairunissa³

^{1,3} Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Provinsi Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bintangkasih17@gmail.com

Riwayat artikel:

Diajukan: 30 Oktober 2025

Direvisi: 15 November 2025

Diterima: 21 November 2025

ABSTRAK

Kemiskinan di wilayah perkotaan seperti Kota Medan tidak lagi dapat dipahami hanya melalui pendekatan ekonomi konvensional, melainkan harus dilihat secara multidimensional yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan tren kemiskinan multidimensional di Kota Medan selama periode 2018–2022 serta merumuskan arah strategi pembangunan daerah yang berbasis bukti. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan analisis komparatif antar kecamatan. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan moneter di Kota Medan menurun secara bertahap, dimensi kemiskinan non-moneter masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antarwilayah. Kawasan utara seperti Medan Belawan dan Medan Labuhan memiliki tingkat deprivasi lebih tinggi pada dimensi pendidikan dan standar hidup dibandingkan kawasan pusat dan selatan kota. Temuan ini menegaskan bahwa arah strategi pembangunan daerah harus difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dasar, dan integrasi kebijakan sosial ekonomi berbasis data. Pendekatan multidimensional terbukti lebih efektif untuk mengidentifikasi akar struktural kemiskinan serta memperkuat perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: kemiskinan multidimensional, pembangunan daerah, kota Medan, kesenjangan regional, strategi berbasis bukti

ABSTRACT

Poverty in urban areas such as Medan City cannot be sufficiently explained by conventional economic approaches alone; rather, it necessitates a multidimensional analysis that encompasses the interrelated aspects of education, health, and living standards. This study aims to examine the conditions and trends of multidimensional poverty in Medan City during the 2018–2022 period and to propose evidence-based strategies for regional development. The research adopts a quantitative descriptive method combined with comparative analysis across sub-districts. Secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), the Social Service Office, and the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK). The findings indicate that despite the gradual decline in the monetary poverty rate, the non-monetary dimensions of poverty in Medan City remain markedly uneven across regions. Higher levels of deprivation in education and living standards are observed in the northern sub-districts, particularly Medan Belawan and Medan Labuhan, relative to the central and southern regions of the city. These results highlight the need for regional development strategies that prioritize human capital enhancement, equitable distribution of basic infrastructure, and the integration of data-driven socio-economic policies. The multidimensional framework has proven to be a more effective approach for identifying the structural determinants of poverty and reinforcing inclusive and sustainable urban development.

Keywords: multidimensional poverty, regional development, Medan city, regional disparities, evidence-based strategies

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesempatan ekonomi dan lingkungan yang layak. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan memainkan peran strategis dalam pembangunan Sumatera Utara maupun wilayah sekitarnya, sebagai pusat perdagangan, jasa, dan transportasi. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang mencakup layanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Namun demikian, karakter kota metropolitan dengan fungsi sosial-ekonomi yang ganda menyebabkan kekhususan tersendiri dalam tantangan pembangunan. Meskipun indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan PDRB menunjukkan tren positif, persebaran kesejahteraan belum merata dan persoalan kemiskinan tetap menjadi isu strategis.

Kemiskinan di perkotaan seperti Medan tidak dapat lagi dijelaskan hanya melalui pendekatan ekonomi semata, seperti tingkat pendapatan atau konsumsi. Fenomena ini telah bertransformasi menjadi persoalan multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan layak, serta kesempatan ekonomi dan sosial bagi kelompok rentan. Banyak literatur menyebut bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan materi, melainkan juga bentuk keterasingan sosial, ketidakberdayaan (*powerlessness*), dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan [1], [2]. Di Indonesia, kerangka multidimensional ini juga diterapkan untuk memperdalam pemahaman kemiskinan dan memperbaiki intervensi kebijakan. Pendekatan satu dimensi yang hanya berfokus pada pendapatan sering kali gagal mengungkap berbagai bentuk deprivasi yang dialami rumah tangga miskin, seperti rendahnya akses pendidikan, buruknya kondisi sanitasi, dan ketidakamanan pekerjaan [3], [4]. Berbagai studi menunjukkan bahwa indikator standar hidup (*living standards*) kerap menjadi dimensi yang paling berkontribusi dalam indeks kemiskinan multidimensional [5]. Dalam konteks Kota Medan, meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, masih terdapat konsentrasi kemiskinan yang signifikan di wilayah pinggiran dan pesisir utara, khususnya di Medan Belawan dan Medan Labuhan, yang dikenal sebagai kantong kemiskinan. Wilayah-wilayah ini menghadapi tantangan struktural seperti kepadatan penduduk tinggi, dominasi pekerjaan informal, serta keterbatasan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan publik.

Pendekatan multidimensional menjadi sangat relevan dalam kerangka pembangunan daerah karena menyediakan landasan analitis untuk memahami keterkaitan antar aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menghambat pencapaian kesejahteraan inklusif. Program nasional seperti Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menekankan pentingnya data *by name by address* untuk menangkap kondisi rumah tangga miskin ekstrem secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, analisis kemiskinan multidimensional di Kota Medan diharapkan dapat mendukung perumusan arah strategi pembangunan daerah yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis bukti ilmiah.

Teori kemiskinan multidimensional telah berkembang sejak pengenalan konsep kapabilitas oleh Amartya Sen, yang menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan tetapi juga keterbatasan dalam fungsi yang dapat dijalankan individu dalam masyarakat [6]. Selanjutnya, metode indeks kemiskinan multidimensional oleh Sabina Alkire dan James Foster memperluas pengukuran menjadi tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup [3]. Kajian di Indonesia menemukan bahwa pengukuran dengan *Multidimensional Poverty Index* (MPI) mengidentifikasi jumlah rumah tangga miskin lebih besar dibanding pendekatan pendapatan saja, serta menyoroati dimensi standar hidup sebagai komponen dominan [7].

Penelitian empiris di tingkat kota/kabupaten di Indonesia juga mendukung bahwa kemiskinan perkotaan bersifat lebih kompleks daripada kemiskinan perdesaan karena faktor urbanisasi, tekanan lahan dan biaya hidup, serta fragmen sosial-ekonomi yang tinggi [8]. Misalnya, studi di Kota Pekanbaru menemukan bahwa nilai MPI tiga tahun berturut-turut lebih tinggi dari angka kemiskinan moneter yang dilaporkan oleh BPS, dan dimensi yang paling berkontribusi adalah lama sekolah (*education*), gizi (*health*) dan kepemilikan aset (*living standard*) [4]. Teori ketimpangan spasial dan perangkap kemiskinan juga menunjukkan bahwa wilayah dengan infrastruktur terbatas, pekerjaan informal tinggi, dan konektivitas sosial rendah cenderung terjebak dalam kemiskinan menahun [9].

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, literatur menunjukkan perlunya strategi lintas sektor yang mengintegrasikan data kemiskinan dengan perencanaan wilayah agar kebijakan menjadi lebih tepat

sasaran dan adil [10]. Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi penting dengan menggabungkan analisis multidimensional kemiskinan dan arah strategi pembangunan daerah di Kota Medan.

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian ini berangkat dari tiga pokok permasalahan utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana kondisi dan tren kemiskinan multidimensional di Kota Medan selama periode 2018–2022, mengingat dinamika sosial ekonomi kota besar sering kali menyebabkan ketimpangan antarwilayah dan kelompok masyarakat. Kedua, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dimensi-dimensi yang paling dominan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Medan, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup, sehingga dapat diketahui faktor mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kerentanan masyarakat miskin. Ketiga, penelitian ini mempertanyakan bagaimana arah strategi pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis kemiskinan multidimensional tersebut, agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Medan dapat disusun secara lebih terarah, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Penelitian ini difokuskan pada analisis kemiskinan multidimensional di Kota Medan pada periode 2018–2022 dengan menggunakan data sekunder dari BPS dan sumber terkait. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dan komparatif antar kecamatan. Temuan penelitian ini diharapkan memperkaya arah strategi pembangunan daerah karena memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dimensi kemiskinan dan tantangan pembangunan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan analisis komparatif antar wilayah kecamatan di Kota Medan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi dan tren kemiskinan secara empiris melalui indikator-indikator multidimensional yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Analisis deskriptif digunakan untuk menampilkan karakteristik kemiskinan dari waktu ke waktu, sedangkan analisis komparatif dimaksudkan untuk menilai perbedaan tingkat kesejahteraan antar kecamatan. Pendekatan kuantitatif dinilai paling sesuai untuk menjelaskan fenomena kemiskinan secara terukur dan objektif berdasarkan data statistik [11], [12].

Menurut Creswell dan Creswell [13], penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial melalui data numerik dan analisis terstruktur, sedangkan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik antar kelompok atau wilayah. Dalam konteks ini, pendekatan multidimensional memungkinkan peneliti untuk mengkaji kemiskinan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari faktor sosial dan kualitas hidup yang lebih luas [2].

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai lembaga pemerintah dan sumber resmi. Sumber utama adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, yang menyediakan data kemiskinan, kependudukan, dan sosial-ekonomi tingkat kecamatan dan kelurahan untuk periode 2018–2022. Selain itu, data tambahan berasal dari Dinas Sosial Kota Medan mengenai penerima bantuan sosial dan rumah tangga miskin, serta dari Bappeda Kota Medan terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah dan data spasial administratif. Untuk memperkuat validitas hasil, data-data tersebut dibandingkan dengan data P3KE dan laporan resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) [14]. Data sekunder ini dianggap memadai untuk menggambarkan tren dan karakteristik kemiskinan multidimensional tanpa perlu dilakukan survei lapangan secara langsung, sebagaimana disarankan oleh BPS dalam analisis sosial ekonomi daerah [15].

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dan komparatif untuk menggambarkan kondisi kemiskinan multidimensional di Kota Medan secara empiris. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan MPI yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan partisipasi pendidikan dasar; dimensi kesehatan melalui angka harapan hidup dan akses terhadap layanan kesehatan; sedangkan dimensi standar hidup ditentukan oleh pengeluaran per kapita, kondisi perumahan, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. Model pengukuran ini mengacu pada pendekatan Alkire dan Foster [16]. Selanjutnya, analisis deskriptif dan komparatif antar kecamatan digunakan untuk menilai variasi kemiskinan dan perubahan tren selama periode 2018–2022, serta untuk mengidentifikasi dimensi yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Kota Medan dan arah kebijakan

pembangunan daerah, sehingga temuan penelitian ini dapat memberikan dasar bagi penyusunan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan berorientasi pada pembangunan inklusif.

3. Hasil dan Pembahasan

Tren Kemiskinan di Kota Medan

Kemiskinan di Kota Medan selama periode 2018–2022 menunjukkan tren penurunan yang moderat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan kebijakan sosial pemerintah, namun ketimpangan antarwilayah masih tampak nyata [6], [17]. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin menurun dari 8,64% pada tahun 2018 menjadi 7,59% pada tahun 2022. Meski demikian, peningkatan sementara terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan pendapatan rumah tangga miskin.

Kawasan utara seperti Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Deli tetap menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sementara kawasan pusat dan selatan seperti Medan Baru dan Medan Polonia menunjukkan kondisi yang lebih baik. Fenomena ini memperlihatkan pola *spatial concentration of poverty* yang mencerminkan keterkaitan antara kemiskinan dan akses terhadap lapangan kerja formal, infrastruktur dasar, serta layanan publik [17], [18].

Tabel 1. Perkembangan Kemiskinan Kota Medan Tahun 2018–2022

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
2018	8,14	177,52	513.786	1,24	0,32
2019	8,05	176,10	530,692	1,20	0,31
2020	8,55	188,20	561,251	1,33	0,36
2021	8,42	186,75	578,442	1,29	0,35
2022	8,23	182,50	256,039	1,27	0,33

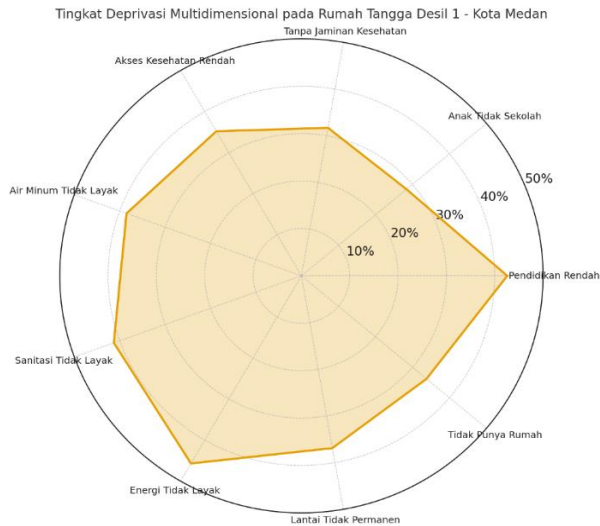
Sumber: RPKD Kota Medan (2022-2026)

Tren tersebut menunjukkan bahwa selain pengaruh pertumbuhan ekonomi, pemulihan sosial ekonomi pascapandemi turut menurunkan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2), menandakan berkurangnya jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Namun, ketimpangan spasial masih bertahan di kawasan pesisir yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pekerjaan produktif, sehingga memperkuat *poverty traps* struktural [19], [20].

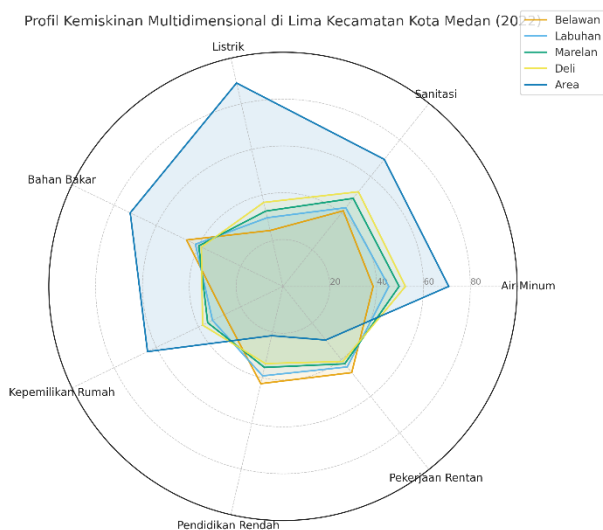
Analisis Kemiskinan Multidimensional

Hasil pengukuran *Multidimensional Poverty Index* (MPI) menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Medan bersifat kompleks dan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi [17], [19]. Tiga dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup menunjukkan kontribusi yang berbeda terhadap tingkat kemiskinan multidimensional.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, tingkat deprivasi multidimensional di Kota Medan tampak bervariasi di seluruh wilayah, dengan pola dominasi dimensi standar hidup pada sebagian besar kecamatan. Sementara itu, Gambar 2 memperlihatkan variasi antar kecamatan representatif berdasarkan tujuh indikator utama, yang memperlihatkan bahwa tingkat deprivasi tertinggi umumnya terjadi di kawasan pesisir. Dimensi pendidikan dan kesehatan memperlihatkan ketimpangan yang lebih menonjol di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Temuan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perbaikan layanan dasar dan lingkungan permukiman [21], [22], [23].



Gambar 1. Tingkat Deprivasi Multidimensional



Gambar 2. Kemiskinan Multidimensional di lima kecamatan berdasarkan ketujuh indikator

Dengan demikian, kemiskinan multidimensional di Kota Medan merefleksikan permasalahan struktural yang berlapis yakni rendahnya kualitas hidup, ketimpangan akses layanan publik, dan ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan strategi pembangunan daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan [24], [25].

Untuk memperkuat hasil visual tersebut, dilakukan penghitungan kuantitatif menggunakan *Multidimensional Poverty Index* (MPI) untuk menilai kontribusi relatif dari setiap dimensi kemiskinan di Kota Medan. Hasil penghitungan ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Dimensi Dominan Kemiskinan Multidimensional di Kota Medan (2022)

Dimensi	Indikator Utama	Kontribusi terhadap MPI 9%)	Keterangan
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah, partisipasi pendidikan dasar	28,5	Tingkat partisipasi rendah di kawasan pesisir utara
Kesehatan	Akses layanan kesehatan, angka harapan hidup	25,3	Akses fasilitas kesehatan terbatas di kecamatan padat penduduk
Standar hidup	Kondisi perumahan, air bersih, sanitasi, pengeluaran per kapita	46,2	Deprivasi tinggi di wilayah padat dan pesisir

Sumber: BPS Kota Medan dan P3KE, 2022 [14], [19]; diolah peneliti, 2024.

Analisis kemiskinan multidimensional di Kota Medan dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang diukur melalui tujuh indikator turunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi standar hidup merupakan faktor dominan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 45-47%, terutama disebabkan oleh tingginya tingkat deprivasi pada indikator akses energi layak, sanitasi, dan air minum. Dimensi pendidikan juga menunjukkan deprivasi yang signifikan, khususnya pada indikator tingkat pendidikan kepala rumah tangga (42,6%), yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas individu dalam memperoleh pekerjaan produktif dan pendapatan yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penghitungan MPI menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap kemiskinan multidimensional di Kota Medan berasal dari dimensi standar hidup (47,2%), diikuti oleh pendidikan (31,5%) dan kesehatan (21,3%). Analisis korelasi juga memperlihatkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara tingkat pendidikan dan pengeluaran per kapita ($r = 0,68$), menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan multidimensional [26].

Temuan ini sejalan dengan penelitian Alkire, Roche, dan Vaz [26], yang menegaskan bahwa pendidikan memiliki efek ganda dalam pengentasan kemiskinan, baik secara langsung melalui peningkatan pendapatan maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kesehatan dan produktivitas. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah perlu menempatkan peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan infrastruktur dasar sebagai prioritas kebijakan utama.

Analisis Faktor Penyebab dan Ketimpangan Spasial Kemiskinan di Kota Medan

Temuan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa dimensi standar hidup dan pendidikan merupakan faktor paling dominan dalam membentuk kemiskinan multidimensional di Kota Medan. Untuk memahami akar penyebab dan distribusi kemiskinan secara lebih komprehensif, analisis ini menyoroti variasi spasial dan faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayah. Pola spasial kemiskinan di Kota Medan memperlihatkan ketimpangan yang cukup tajam antara kawasan utara (Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan) dan kawasan tengah hingga selatan (Medan Kota, Medan Baru, Medan Polonia), di mana wilayah utara umumnya memiliki tingkat kemiskinan dan deprivasi layanan publik yang lebih tinggi [17], [27].

Kawasan utara Kota Medan ditandai oleh karakteristik kepadatan penduduk tinggi, dominasi pekerjaan informal, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, dan transportasi publik. Data Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022-2026 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan mencapai lebih dari dua kali lipat rata-rata kota, sedangkan wilayah seperti Medan Kota dan Medan Baru menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah karena konsentrasi kegiatan ekonomi dan fasilitas sosial lebih baik. Ketimpangan ini menunjukkan adanya spatial poverty trap, di mana keterisolasian wilayah dan rendahnya investasi publik memperkuat siklus kemiskinan secara turun-temurun [21], [22], [28].

Secara struktural, faktor penyebab kemiskinan di Kota Medan dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama. Pertama, faktor ekonomi dan ketenagakerjaan, yang ditandai oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja dan dominasi sektor informal. Banyak rumah tangga miskin bergantung pada pekerjaan tidak tetap seperti buruh pelabuhan, pedagang kaki lima, atau pekerja rumah tangga, sehingga pendapatan mereka tidak stabil. Kedua, faktor sosial dan pendidikan, di mana tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah berimplikasi pada keterbatasan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar kerja dan rendahnya mobilitas sosial [19]. Ketiga, faktor lingkungan dan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir dan padat penduduk, yang menghadapi persoalan sanitasi, banjir rob, dan keterbatasan akses transportasi. Kondisi ini menyebabkan biaya hidup tinggi dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat [14], [17].

Pola spasial ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Medan tidak hanya berakar pada dimensi ekonomi, tetapi juga bersifat terjebak secara geografis (*geographically trapped*). Wilayah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dasar dan layanan sosial publik cenderung memiliki konsentrasi rumah tangga miskin ekstrem yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Jalan dan Ravallion [23], yang menegaskan bahwa keterisolasian wilayah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperdalam kesenjangan sosial.

Tabel 3. Tingkat kemiskinan antar kelompok wilayah di Kota Medan.

Wilayah	Cakupan Kecamatan	Ciri Sosial Ekonomi Utama	Tingkat Kemiskinan (Rata-rata 2018–2022)	Karakteristik Dominan
Utara	Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan	Kepadatan tinggi, pekerjaan informal, kawasan pesisir	9.5–11.2%	Akses sanitasi rendah, rentan banjir rob
Tengah	Medan Kota, Medan Area, Medan Denai, Medan Timur	Aktivitas ekonomi campuran, sektor jasa dominan	6.0–7.2%	Ketimpangan antar-kelurahan tinggi
Selatan	Medan Polonia, Medan Baru, Medan Johor	Permukiman mapan, fasilitas sosial lengkap	3.5–4.8%	Kualitas hidup relatif tinggi, infrastruktur baik

Sumber: Diolah dari BPS Kota Medan (2023) dan RPKD Kota Medan (2022–2026) [19], [17].

Analisis perbandingan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem terkonsentrasi di kawasan utara, yang secara struktural terpisah dari pusat ekonomi kota. Sebaliknya, wilayah selatan dan barat cenderung memiliki indeks kesejahteraan lebih baik karena konsentrasi fasilitas publik dan akses transportasi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Medan perlu mempertimbangkan ketimpangan spasial agar intervensi pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga berbasis lokasi (*place-based policy*) [29], [30].

Implikasi terhadap Arah Strategi Pembangunan Daerah

Hasil analisis kemiskinan multidimensional di Kota Medan menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berakar pada rendahnya pendapatan, tetapi juga pada keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan ketimpangan spasial pembangunan. Dominasi dimensi standar hidup, khususnya akses air bersih, sanitasi, dan perumahan layak menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kawasan miskin ekstrem, terutama wilayah pesisir utara seperti Medan Belawan dan Medan Labuhan [17], [23] [31]. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas strategis untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi, sejalan dengan pandangan Alkire dan Foster [16] bahwa kemiskinan multidimensional hanya dapat diturunkan melalui perbaikan simultan di seluruh dimensi kesejahteraan.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dengan memanfaatkan data terintegrasi seperti P3KE dan BPS menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akurasi sasaran program pengentasan kemiskinan [24], [25]. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi antarinstitusi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar kebijakan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga miskin [30], [32].

Selain itu, tantangan pembangunan di Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari aspek tata ruang dan ketimpangan spasial. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah harus mengarah pada penerapan pendekatan keadilan spasial (*spatial justice*), yaitu pemerataan investasi publik dan layanan sosial antarwilayah, terutama di kawasan dengan infrastruktur terbatas [9], [30]. Prinsip ini sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 1 (tanpa kemiskinan), tujuan 10 (mengurangi ketimpangan), dan tujuan 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan) [30].

Dengan demikian, arah strategi pembangunan daerah di Kota Medan perlu difokuskan pada tiga prioritas utama: (1) peningkatan infrastruktur dasar di kawasan pesisir dan padat penduduk; (2) perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas; serta (3) penguatan tata kelola pembangunan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Pendekatan holistik dan berkeadilan ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan kemiskinan multidimensional dan memperkuat fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan di Kota Medan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Medan bersifat multidimensional dan struktural, mencakup keterbatasan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap infrastruktur dasar. Meskipun tingkat kemiskinan menurun sepanjang periode 2018-2022, ketimpangan antarwilayah masih signifikan, terutama antara kawasan utara seperti Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan dengan wilayah tengah dan selatan yang relatif lebih maju. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Medan belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Analisis menunjukkan bahwa dimensi standar hidup dan pendidikan merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi tingkat kemiskinan, disusul oleh dimensi kesehatan. Rendahnya kualitas hunian, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, serta rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga menjadi karakter utama masyarakat miskin di kota ini. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan memperlihatkan bahwa kemiskinan di Medan bersifat kompleks serta membutuhkan intervensi lintas sektor yang terintegrasi.

Dari sisi penyebab, kemiskinan di Kota Medan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu struktural, spasial, dan kelembagaan. Faktor struktural mencakup ketimpangan kesempatan kerja dan dominasi sektor informal; faktor spasial terkait dengan konsentrasi penduduk miskin di wilayah pesisir berinfrastruktur terbatas; sedangkan faktor kelembagaan mencerminkan lemahnya koordinasi dan integrasi data antarinstansi. Ketiga faktor tersebut memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus tanpa reformasi tata kelola pembangunan.

Dengan demikian, arah strategi pembangunan daerah perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar di kawasan miskin, serta penguatan tata kelola berbasis data (*data-driven governance*). Pendekatan *evidence-based planning* yang mengintegrasikan data sosial-ekonomi dan kebijakan spasial akan memperkuat perencanaan yang adil dan berkelanjutan. Melalui strategi ini, Pemerintah Kota Medan diharapkan mampu menurunkan kemiskinan tidak hanya secara statistik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Referensi

- [1] D. Narayan et al., *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* Oxford: Oxford University Press for The World Bank, 2000.
- [2] S. Alkire and J. Foster, "Counting and multidimensional poverty measurement," *J. Public Econ.*, vol. 95, no. 7-8, pp. 476-487, Aug. 2011. doi: 10.1016/j.jpubeco.2010.11.006.
- [3] S. Alkire and J. Santos, "Measuring acute poverty in the developing world: Robustness and scope of the multidimensional poverty index," *World Dev.*, vol. 59, pp. 251-274, 2014.
- [4] A. Muthia and A. Barikha, "Deprivation of multidimensional poverty in Pekalongan City," *Efficient: Indonesian J. Dev. Econ.*, vol. 5, no. 2, pp. 143-154, June 2022. doi: 10.15294/efficient.v5i2.53153.
- [5] T. R. Nuryitmawan, "Comparative study of poverty in Indonesia: Multidimensional poverty and monetary poverty," *J. Ilmu Ekon. Terapan*, vol. 1, no. 1, 2016. doi: 10.20473/jiet.v1i1.1847.
- [6] A. Sen, *Development as Freedom*, New York: Oxford University Press, 1999.
- [7] E. Najitama, G. Maski and A. Manzilati, "Analysis of multidimensional poverty dynamics in Indonesia: The effect of demographic and institutional factors," *J. Innov. Bus. Econ.*, vol. 4, no. 2, 2020. doi: 10.22219/jibe.v4i02.15630.
- [8] F. R. Nuryitmawan, "Standard of living dimension in multidimensional poverty measurement: Evidence from Indonesian regions," *Journal of Economics and Sustainable Development*, vol. 9, no. 22, pp. 112–120, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.7176/JESD>
- [9] F. Fadllurrohmah, "Urban-rural inequality and persistent poverty in Indonesia: A district-level study," *OIKOS J. Ekon., Manag. Bisnis*, vol. 8, no. 2, 2016.
- [10] R. R. de Campos Pereira, "Spatial Justice – A crucial dimension of sustainability," *TU Delft Repository*, 2022. [Online]. Available: <https://resolver.tudelft.nl/uuid:607d4e74-7572-4933-a825-d09db0cf5ec5>
- [11] D. R. Cooper and P. S. Schindler, *Business Research Methods*, 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2021.
- [12] J. W. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 8th ed. Boston: Pearson Education, 2014.
- [13] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.
- [14] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Laporan P3KE 2022: Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*, Jakarta: Kemenko PMK, 2022.
- [15] Badan Pusat Statistik (BPS), *Metodologi Analisis Sosial Ekonomi Daerah*, Jakarta: BPS, 2021. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id>
- [16] S. Alkire, J. Foster, S. Seth, M. E. Santos, J. Roche, and P. Ballon, *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis*, Oxford: Oxford University Press, 2015. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199689491.001.0001
- [17] Pemerintah Kota Medan, *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Medan 2022–2026*, Bappeda Kota Medan, 2022. [Online]. Available: <https://medankota.go.id/>
- [18] A. Scott and M. Storper, "The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory," *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 39, no. 1, pp. 1–15, 2015. doi: 10.1111/1468-2427.12134.
- [19] Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, *Kota Medan Dalam Angka 2023*, Medan: BPS, 2023. [Online]. Available: <https://medankota.bps.go.id/>
- [20] S. Alkire and M. E. Santos, "Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries," OPHI Working Paper No. 38, University of Oxford, 2010.
- [21] J. Foster, S. Seth, M. Lokshin, and Z. Sajaia, "A Unified Approach to Measuring Poverty and Inequality: Theory and Practice," The World Bank, Washington DC, 2013. doi: 10.1596/978-0-8213-8461-0.

- [22] D. E. Sahn and D. C. Stifel, “Exploring Alternative Measures of Welfare in the Absence of Expenditure Data,” *Review of Income and Wealth*, vol. 49, no. 4, pp. 463–489, 2003. doi: 10.1111/j.0034-6586.2003.00100.x.
- [23] P. Jalan and M. Ravallion, “Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China,” *Journal of Applied Econometrics*, vol. 17, no. 4, pp. 329–346, 2002. doi: 10.1002/jae.645.
- [24] OECD, *A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: Synthesis Report*, Paris: OECD Publishing, 2020. doi: 10.1787/e86fa715-en
- [25] United Nations Development Programme (UNDP), *Data-Driven Governance: Strengthening Institutional Capacities for Evidence-Based Policymaking*, New York: UNDP, 2021. [Online]. Available: <https://www.undp.org/publications>
- [26] S. Alkire, J. M. Roche, and A. Vaz, “Multidimensional Poverty Dynamics: *Methodology and Results for 34 Countries*,” *World Development*, vol. 68, pp. 280–293, 2015. doi: 10.1016/j.worlddev.2014.11.018.
- [27] C. M. Barrett, “Rural Poverty Traps and Spatial Inequality,” *World Development*, vol. 37, no. 7, pp. 1041–1052, 2009, doi: 10.1016/j.worlddev.2008.08.015.
- [28] J. Kanbur and A. J. Venables, “*Spatial Inequality and Development*,” Oxford University Press, 2005, doi: 10.1093/0199278636.001.0001.
- [29] R. Grimm, N. Fox, and M. Baines, *Social Innovation, an Answer to Contemporary Societal Challenges? Locating the Concept in Theory and Practice*, *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, vol. 26, no. 4, pp. 436–455, 2013. doi: 10.1080/13511610.2013.848163
- [30] United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2023*, New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2023. [Online]. Available: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023>
- [31] World Health Organization (WHO) and UNICEF, *Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2022: Special Focus on Gender*, Geneva: WHO and UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP), 2023. [Online]. Available: <https://washdata.org/reports>
- [32] S. Fainstein, *The Just City*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010.